

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan suatu negara untuk lebih maju dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan dituang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan menurut peraturan daerah Renyowijoyo, (2012:54). APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan tahun yang dianggarkan. Fungsi ini menjadikan APBD sangat penting karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat

dilaksanakan kecuali dimasukkan dalam APBD dan laporan keuangan (Habiburrahman, 2016).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Jika anggaran tersebut tidak memperhatikan kepentingan publik, maka sangat tidak adil untuk masyarakat. Untuk itu informasi dalam laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, dan bagaimana mengevaluasi laporan keuangan. Selain itu tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan pada masa lalu dan sekarang yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang kebijakan di masa yang akan datang.

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya yaitu mencari laba atau keuntungan. Pada sektor swasta, anggaran merupakan

hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan di perbaiki pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pada sistem anggarannya.

Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mengatur jalannya pemerintah pada daerah tersebut, sebagai sektor publik pemerintah daerah harus menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, termasuk pada pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada dan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraann pemerintah Negara (MuindroRenyowijoyo, 2012).

Adanya desentralisasi pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan ekonomis, efektif dan efisien kinerja Program yang disusun berdasarkan anggaran kinerja ini berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana prioritas strategis yang ingin dicapai. Dari hasil (*outcomes*) yang dicapai mencerminkan visi, misi suatu organisasi. Komponen anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, standar biaya dan pengukuran kinerja. Ketiga hal tersebut merupakan alat yang digunakan untuk

menilai *input*, *output* dan *outcomes* suatu program yang disusun berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja. Apabila efektifitas dan efisiensi kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan visi dari seluruh organisasi sektor publik.

Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah pada pengeluaran keuangan daerah Kab. Manggarai Barat maka harus disusun dan disiapkan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterapkan secara umum. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan Daerah Kab Manggarai Barat yang menyatakan bahwa bentuk isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diberikan otonomi atau kewenangan kepada instansi untuk mengurus keuangannya sendiri sehingga pemerintah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: pendapatan, transfer, belanja, surplus, atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

(SILPA/SIPKA). Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pentingnya penyandingan antara anggaran dengan realisasinya untuk menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk mengetahui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kab.Manggarai Barat, maka hal tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan dan analisis belanja. Untuk menganalisis pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kab.Manggarai Barat, secara umum terlihat dari laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat menilai efektifitas dan efisiensi dari pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan oleh BKAD Kab. Manggarai Barat.

Lebih lanjut, Laporan Realisasi Anggaran merupakan alat ukur finansial yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian kinerja pemerintah daerah. Salah satu komponen yang merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja berdasarkan LRA adalah komponen belanja daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Masalah yang biasanya sering terjadi dalam laporan realisasi anggaran dapat dilihat dari kajian sisi belanja pada pemerintah daerah ataupun satuan kerja perangkat daerah yaitu rendahnya penyerapan anggaran belanja baik itu

belanja langsung maupun tidak langsung, dimana masih adanya sisa anggaran belanja yang tidak direalisasikan. Oleh karena itu penyerapan anggaran yang kurang, akan menimbulkan masalah-masalah lain seperti semakin menurunnya pertumbuhan belanja dan juga ada anggaran belanja yang belum terealisasi, hal ini disebabkan karna pemerintah daerah tidak dapat mengelola keuangannya dengan hemat.

Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Manggarai Barat yang menunjukkan adanya permasalahan belanja adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Berikut ini adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah Kab. Manggarai Barat.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasinya**  
**BKAD Kab. Manggarai Barat Tahun 2020-2022**

| Tahun | Anggaran                | Realisasi               | Persentase (%) |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 2020  | Rp.1,162,831,056,308.65 | Rp.1,116,059,651,268.17 | 95.97 %        |
| 2021  | Rp.1,135,287,835,628.00 | Rp.1,089,504,348,684.77 | 95.96%         |
| 2022  | Rp.1,330,686,744,398.00 | Rp.1,255,652,663,532.58 | 94.36%         |

Sumber Data: BKAD Kab. Manggarai Barat

Berdasarkan hasil rasio efektivitas anggaran pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020-2022 dinilai sudah efektif dalam mengelola anggaran pendapatan dimana pada tahun 2020 sebesar 95,97%, tahun 2021 sebesar 95,96% dan tahun 2022 sebesar 94,36%. Tingkat efektif yang paling tinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 95,97%.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Anggaran Belanja dan Realisasinya**  
**BKAD Kab. Manggarai Barat Tahun 2020-2022**

| Tahun | Anggaran                | Realisasi               | Persentase (%) |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 2020  | Rp.1,024,791,155,298.01 | Rp.1,151,092,170,354.51 | 112.32%        |
| 2021  | Rp.1,403,591,351,175.00 | Rp.1,099,242,832,552.24 | 78.32%         |
| 2022  | Rp.1,581,873,367,077.00 | Rp.1,494,280,238,969.32 | 94.463         |

Sumber Data : BKAD Kab. Manggarai Barat

Berdasarkan hasil rasio efisiensi belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2020 dan 2022 dinilai tidak efisien karena ada angka yang melebihi anggaran belanja dimana untuk tahun 2020 sebesar 112,32% dan tahun 2022 sebesar 94,46%. Sedangkan tingkat rasio yang mencapai kriteria efisien yaitu pada tahun 2021 sebesar 78,31%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dien et al, (2015:534) menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap efektif dan efisien penggunaan anggaran keuangan. Hal ini ditunjukkan bahwa semakin efektif dan efisien penggunaan anggaran dan belanja daerah maka kinerja keuangan daerah pun semakin tinggi peningkatan kinerjanya. Disisi lain penelitian yang dilakukan Maechelino Dailing (2013:82) menemukan bahwa kinerja pendapatan belum sepenuhnya efektif yang dilihat dari lebih kecilnya jumlah yang direalisasikan dengan yang dianggarkan. Adapun dengan kinerja belanja pada pemerintah daerah sudah efektif hal ini didukung dengan kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Sehingga pemerintah daerah harus melakukan penghematan dan melakukan peningkatan PAD dan disertai dengan penghematan belanja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini yakni: Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah!

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memperkaya ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintah serta masukan empiris untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya kajian akuntansi pemerintahan yang berkaitan dengan realisasi anggaran.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat**

Penulis mengharapkan penelitian ini menjadi pengetahuan dan masukan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten



Manggarai Barat mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.